



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2020/Periodik - 2019)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**UNIT KERJA** : BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA  
**SUB UNIT KERJA** : BAGIAN PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG/JASA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SUPAAT
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO
3. NHK : 212053

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 950.000.000**

1. Tanah Seluas 200 m2 di SEMARANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 225.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/75 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/45 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 132.500.000**

1. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
3. MOTOR, HONDA MEGA PRO SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
5. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
6. MOTOR, YAMAHA R 15 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 13.500.000
7. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	3.250.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	50.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	143.780.124
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.279.530.124
III. HUTANG	Rp.	12.202.612
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.267.327.512

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **9 Maret 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.